**BAB IV**

**PENUTUP**

**4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya mengenai Sistem dan Prosedur Penggajian Pegawai Negeri Sipil pada Balai Penelitian Ternak Ciawi Bogor maka penyusun dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Sistem penggajian pada Balai Penelitian Ternak Ciawi, Bogor menggunakan sistem skala gabungan yang dimana sistem skala gabungan berupa perhitungan dan pembuatan daftar gaji dilakukan menggunakan aplikasi Gaji PNS Pusat (GPP) dan dibayarkan untuk seluruh gaji pokok, tunjangan - tunjangan dan potongan lainnya, serta telah menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya belanja pegawai dengan baik dan melakukan pelaporan hasil pelaksanaan dari anggaran belanja pegawai tersebut melalui Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan melaporkannya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
2. Prosedur penggajian pegawai pada Balai Penelitian Ternak Ciawi mengacu pada Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai bahan untuk dikeluarkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Pengumpulan berkas berupa data kelengkapan pegawai juga merupakan faktor terpenting sebelum dilakukan proses penggajian.

**4.2 Saran**

Dari hasil evaluasi sistem dan prosedur serta pengamatan yang dilakukan, maka penyusun mencoba untuk memberikan saran terhadap pelaksanaan sistem dan prosedur penggajian pada Balai Penelitian Ternak Ciawi Bogor antara lain sebagai berikut :

Pada dasarnya prosedur pelaksanaan dan perhitungan gaji melalui aplikasi Gaji PNS Pusat (GPP) telah dilakukan dengan baik, akan tetapi penyusun mengamati koordinasi atau kerja sama antar pegawai lainnya yang kurang sehingga memicu timbulnya kesalahan non teknis seperti keterlambatan administrasi penggajian seperti KP4 (Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga) yang sifatnya personal maupun pemberian SK dari bagian kepegawaian terhadap bagian keuangan dan administrasi penggajian lainnya. Maka dari itu perlu adanya suatu kebijakan oleh pejabat yang berwenang dalam pengelolaan serta kepengurusan SK yang bekaitan dengan penggajian. Hal tersebut berkatan dengan kedisiplinan dan tanggung jawab antar pegawai maupun antar bagian unit kerja terkait hak dan kewajibannya didalam pekerjaan sehingga kendala atau permasalahan yang terjadi dapat ditanggulangi.